



Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Nur Aulia saskia^{1*}, Rosalina Kumalawati²

¹Mahasiswa, Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat

²Dosen, Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat

2410416120012@mhs.ulm.ac.id, rosalina.kumalawati@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan ketimpangan pembangunan di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan, namun belum tentu diikuti dengan pemerataan pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi, mengukur ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson, dan menguji hubungan keduanya melalui analisis korelasi Pearson. Data yang digunakan yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Williamson periode 2020–2024. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan bersifat fluktuatif dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 31,30 persen, sementara tahun lainnya relatif lebih rendah. Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan ketimpangan yang meningkat dari 0,38 pada 2020 menjadi 0,50 pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 0,49 pada 2024. Uji korelasi Pearson menghasilkan nilai 0,20, yang menunjukkan hubungan lemah dan searah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang dapat menekankan pemerataan distribusi pembangunan di seluruh daerah Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Indeks Williamson, PDRB, Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sering kali dipandang sebagai indikator utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya distribusi hasil pembangunan tidak selalu berjalan merata (Sultan et al., 2023). Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi persoalan ketimpangan antarwilayah tetap muncul (Ningsih & Pahlevi, 2024). Ketimpangan tersebut mencerminkan adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya, sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, permasalahan utama yang perlu dicermati yakni pada pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tidak secara langsung mampu menurunkan ketimpangan wilayah.

Untuk memahami persoalan tersebut, diperlukan suatu kajian yang menekankan pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, direpresentasikan berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan ketimpangan wilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Dengan memotret kondisi Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024, penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana peningkatan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan antarwilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji ketimpangan regional di Indonesia dengan menggunakan Indeks Williamson. Laporan resmi BPS Jawa Tengah (2023) menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson di provinsi tersebut pada periode 2019–2023 berada pada kategori ketimpangan sedang dengan tren yang relatif stabil dari tahun ke tahun. (BPS Jawa Tengah, 2023). Temuan ini menegaskan relevansi Indeks Williamson sebagai alat ukur pemerataan pembangunan daerah.

Selaras dengan hal tersebut, penelitian (Ririn Nopiah et al., 2024) menelaah ketimpangan di wilayah Barat Indonesia pada periode 2019–2022 dengan mengaitkan Indeks Williamson dan belanja pemerintah daerah. Hasilnya memperlihatkan bahwa belanja publik berpengaruh signifikan terhadap penurunan disparitas, sehingga menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan.

Studi lain oleh (Wijayanti et al., 2023). Temuan ini memperkuat konteks bahwa ketimpangan regional di Indonesia bersifat heterogen antarwilayah. emperluas pembahasan dengan menyoroti volatilitas nilai Indeks Williamson antarprovinsi di Indonesia. Beberapa provinsi menunjukkan tren konvergensi, sedangkan provinsi lain justru mengalami divergensi, yang memperkuat pemahaman bahwa ketimpangan regional bersifat heterogen.

Khusus di Kalimantan Selatan, (Yasari, 2021) menemukan adanya kecenderungan konvergensi pertumbuhan ekonomi pada periode 2011–2019, namun ketimpangan antar kabupaten/kota masih tetap terjadi. Penelitian ini penting sebagai dasar untuk memahami dinamika pembangunan daerah, meskipun terbatas hanya hingga sebelum pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, kajian (Aditya et al., 2025) menekankan bahwa faktor-faktor seperti investasi, aglomerasi perkotaan, indeks pembangunan manusia, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam membentuk disparitas regional. Hal ini relevan untuk menjelaskan mengapa ketimpangan tetap terjadi meskipun pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah Indonesia relatif tinggi.

Dari kajian-kajian tersebut, terdapat dua kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi. Pertama, dari sisi spasial, sebagian besar penelitian berfokus pada Jawa atau provinsi lain, sedangkan studi terbaru khusus Kalimantan Selatan masih terbatas, dengan penelitian terakhir hanya mencakup periode hingga 2019. Kedua, dari sisi temporal, penelitian BPS maupun akademik umumnya berhenti pada tahun 2022 atau 2023, sehingga belum ada pembaruan pasca-pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah di Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024.

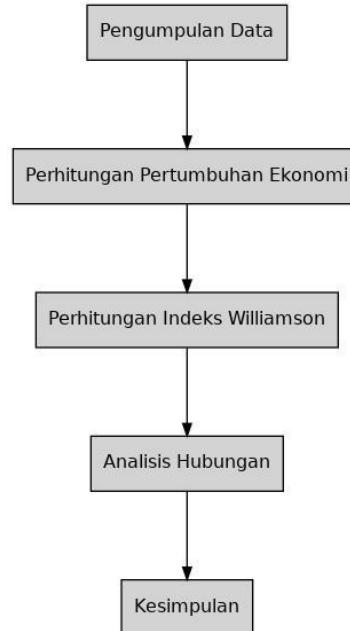
Keterbaruan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperbarui bukti empiris di Kalimantan Selatan dengan memasukkan data pasca-COVID, sekaligus membandingkan tren PDRB per kapita dengan Indeks Williamson. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi di Kalsel berimplikasi pada pemerataan pembangunan, serta menjadi dasar pertimbangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu berkontribusi pada pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai dinamika pembangunan regional, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis data bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di tingkat provinsi.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sistematis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Tahapan pertama adalah pengumpulan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) serta jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020–2024, yang didapatkan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Tahap kedua adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB per kapita. Tahap ketiga adalah perhitungan ketimpangan wilayah menggunakan Indeks Williamson. Selanjutnya, dilakukan pengujian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah untuk mengetahui pola keterkaitan antarvariabel. Hasil akhir dianalisis dan diinterpretasikan guna memberikan gambaran mengenai dinamika pembangunan di Kalimantan Selatan.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Jenis data meliputi PDRB atas dasar harga berlaku per kabupaten/kota dan jumlah penduduk pada periode 2020–2024. Rincian sumber data ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Satuan	Periode	Sumber
PDRB ADHB per kabupaten/kota	Juta Rupiah	2020-2024	BPS Kalimantan Selatan
Jumlah Penduduk	Jiwa	2020-2024	BPS Kalimantan Selatan

Variabel Penelitian dan Perhitungan

Pada penelitian ini menggunakan variabel utama yaitu pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan wilayah. Variabel, indikator, dan metode perhitungan dijelaskan di Tabel 2.

Tabel 2. Variabel, Indikator, serta Metode Perhitungan

Variabel	Indikator	Metode Perhitungan
Pertumbuhan ekonomi	PDRB per kapita ADHB	Rumus (1)
Ketimpangan wilayah	Indeks Williamson	Rumus (2)
Hubungan antarvariabel	Keterkaitan statistik	Rumus (3)

Rumus Penelitian

1. Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)

Analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antar daerah yakni adalah Indeks Williamson. Indeks ini dihitung berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduknya. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi tingkat ketimpangan antar daerah (Williamson, 1965). Berikut merupakan rumus Indeks Williamson.

$$IW = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (y_i - \bar{y})^2}{Ny^2}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- f_i = jumlah penduduk di daerah ke- i
- y_i = PDRB per kapita daerah ke- i
- \bar{y} = rata-rata PDRB per kapita seluruh daerah
- N = total jumlah penduduk
- n = jumlah daerah yang diamati

2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan PDRB per kapita antar tahun. Analisis ini digunakan untuk melihat peningkatan atau penurunan kinerja ekonomi suatu wilayah (Galbraith, 1964). Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- g_t = pertumbuhan ekonomi tahun ke- t (dalam persen)
- Y_t = PDRB per kapita pada tahun ke- t
- Y_{t-1} = PDRB per kapita pada tahun sebelumnya

3. Analisis Hubungan (Korelasi Pearson)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan Korelasi Pearson. Hasil akhir apabila nilai koefisien korelasi (r) berada diantara -1 sampai +1. Hasil nilai positif mengindikasikan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menandakan hubungan berlawanan (Foster et al., 2018). Rumus korelasi Pearson terdaapat di bawah ini:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi Pearson
- n = jumlah data
- x = variabel pertumbuhan ekonomi
- y = variabel ketimpangan (Indeks Williamson)



HASIL DAN PEMBAHASAN

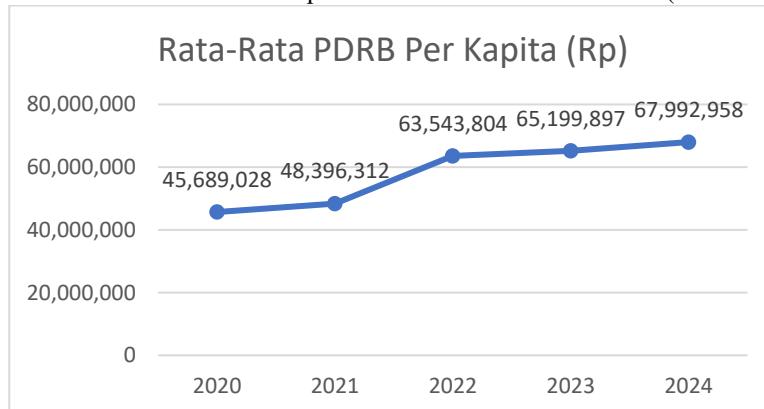
Perkembangan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta Indeks Williamson di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024 disampaikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Rata-rata PDRB Per Kapita dan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Selatan (2020–2024)

Tahun	Rata-Rata PDRB Per Kapita (Rp)	Indeks Williamson
2020	45.689.028	0,38
2021	48.396.312	0,39
2022	63.543.804	0,49
2023	65.199.897	0,50
2024	67.992.958	0,49

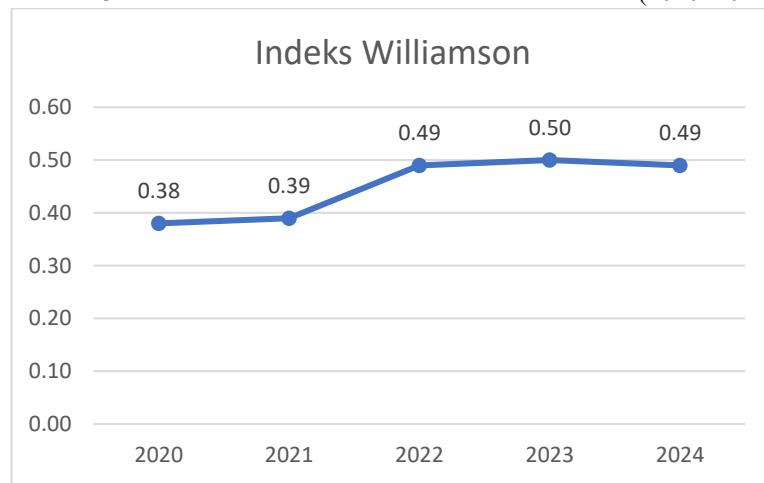
Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Gambar 2. Trend PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan (2020–2024)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Gambar 3. Trend Indeks Williamson di Kalimantan Selatan (2020–2024)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data di table 3, memperlihatkan adanya peningkatan pada tiap-tiap tahunnya. Di tahun 2020 diketahui bahwa nilai PDRB per kapita sebesar Rp45,69 juta, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp48,39 juta pada 2021. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 terdapat lonjakan mencapai Rp63,54 juta, dan terus naik pada 2023 serta 2024 dengan nilai masing-masing Rp65,20 juta dan Rp67,99 juta. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh positif sepanjang periode 2020–2024.

Di sisi lain, Indeks Williamson yang mencerminkan tingkat ketimpangan wilayah juga mengalami perubahan. Pada tahun 2020 nilai ketimpangan berada di angka 0,38, kemudian naik bertahap menjadi 0,39 pada 2021. Kenaikan cukup tajam terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 0,49, dan bahkan mencapai 0,50 pada tahun 2023. Meski pada 2024 sedikit menurun ke angka 0,49, secara umum tren menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Kondisi ini memperlihatkan adanya fenomena paradoks pembangunan, yaitu peningkatan PDRB per kapita tidak sepenuhnya diikuti dengan penurunan ketimpangan. Sebaliknya, meskipun ekonomi daerah tumbuh, distribusi hasil pembangunan antarwilayah masih belum merata.

Pertumbuhan Ekonomi

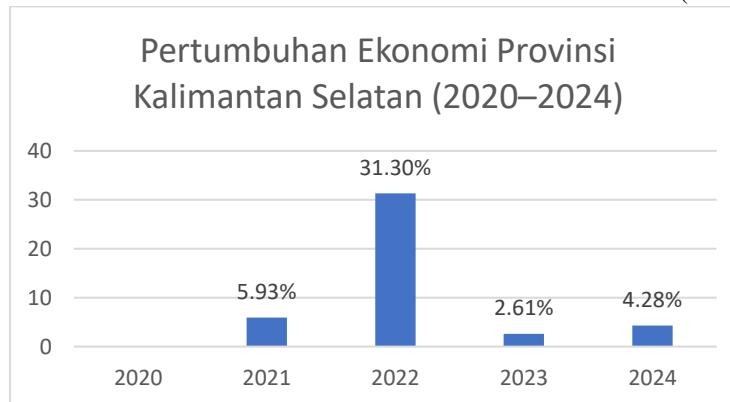
Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020–2024 ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan PDRB Per Kapita (2020–2024)

Tahun	Rata-Rata PDRB Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	45.689.028	-
2021	48.396.312	5,93
2022	63.543.804	31,30
2023	65.199.897	2,61
2024	67.992.958	4,28

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Gambar 4. Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (2020–2024)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan cenderung fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,93%, yang relatif stabil setelah masa awal pandemi COVID-19. Lonjakan signifikan terjadi pada 2022 dengan pertumbuhan mencapai 31,30%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas produksi serta perdagangan. Namun, pada 2023 pertumbuhan melambat drastis menjadi hanya 2,61%, sebelum kembali meningkat ke level 4,28% pada tahun 2024.

Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun perekonomian Kalimantan Selatan terus bertumbuh, laju pertumbuhan tidak berlangsung stabil, melainkan mengalami lonjakan tajam pada tahun tertentu dan perlambatan pada tahun berikutnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas unggulan, investasi sektor tertentu, serta dampak kebijakan fiskal daerah.

Indeks Williamson

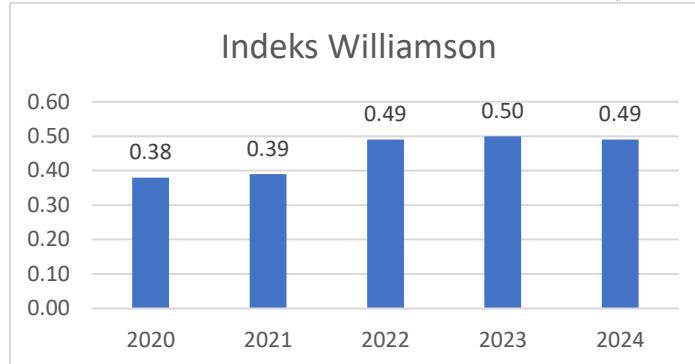
Indeks Williamson diaplikasikan untuk dapat mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai indeksnya berkisar dari 0 hingga 1, hal ini mengindikasikan semakin mendekati 0 berarti semakin merata, dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin tinggi.

Tabel 5. Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan (2020–2024)

Tahun	Indeks Williamson
2020	0,38
2021	0,39
2022	0,49
2023	0,50
2024	0,49

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Gambar 5. Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan (2020–2024)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2020-2024)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Kalimantan Selatan mengarah pada peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 nilai Indeks Williamson tercatat 0,38 dan meningkat secara bertahap menjadi 0,39 pada 2021. Lonjakan terjadi pada 2022 dengan nilai mencapai 0,49, kemudian naik lagi ke 0,50 pada 2023. Pada 2024, nilai indeks sedikit menurun menjadi 0,49, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan awal periode.

Secara umum, tren ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode 2020–2024 belum diikuti oleh pemerataan antarwilayah, karena disparitas antar kabupaten/kota semakin melebar.

Jika dibandingkan dengan penelitian di provinsi lain, misalnya (BPS Jawa Tengah, 2023) yang melaporkan nilai IW di tahun 2019 tercatat 0,6186, kemudian tahun 2020 tercatat 0,6564, berikutnya tahun 2021 mencapai 0,6549, tahun 2022 mencapai 0,6525, dan tahun 2023 mencapai 0,6325, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan relatif lebih rendah. Studi oleh (Ririn Nopiah et al., 2024) juga menemukan bahwa nilai IW cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah dengan ketergantungan pada sektor primer. Hal ini konsisten dengan kondisi Kalimantan Selatan, di mana struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan sehingga pertumbuhan tidak merata antarwilayah (Pratiwi, 2021).

Analisis Korelasi Pearson

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan wilayah diketahui dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar **0,20**.

Tabel 6. Hasil Analisis Korelasi Pearson

Tahun	Pertumbuhan (%)	Indeks Williamson
2021	5,93	0,39
2022	31,30	0,49
2023	2,61	0,50
2024	4,28	0,49
Korelasi Pearson		0,20

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2020-2024), diolah penulis

Nilai korelasi $r = 0,20$ mengindikasikan terdapat hubungan yang mengarah positif namun sangat lemah diantara pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan wilayah di Kalimantan Selatan pada periode 2020–2024. Positif berarti arah hubungan sejalan: ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai Indeks Williamson juga cenderung meningkat.

Namun, karena nilai korelasi relatif kecil ($<0,30$), hubungan tersebut tidak signifikan secara kuat. Artinya, peningkatan PDRB per kapita tidak secara otomatis berdampak nyata pada peningkatan ketimpangan, atau sebaliknya. Faktor lain seperti distribusi belanja publik, struktur ekonomi daerah, dan konsentrasi sektor unggulan diduga lebih dominan memengaruhi pola ketimpangan.

Hasil korelasi Pearson ($r \approx 0,20$) menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah antara laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Williamson di Kalimantan Selatan pada periode 2021–2024. Secara empiris hal ini bermakna bahwa meskipun rata-rata PDRB per kapita provinsi meningkat tajam (dari \approx Rp45,7 juta pada 2020 menjadi \approx Rp68,0 juta pada 2024), peningkatan tersebut tidak diikuti oleh pemerataan yang signifikan antar kabupaten/kota—ketimpangan justru meningkat pada 2022–2023 sebelum sedikit mereda pada 2024. Pola ini mengindikasikan adanya fenomena di mana pertumbuhan bersifat *concentrated growth* (terkonsentrasi) di beberapa wilayah sehingga efek pemicu perbaikan pemerataan menjadi terbatas.

Beberapa mekanisme dapat menjelaskan temuan tersebut. Pertama, struktur ekonomi provinsi yang masih didominasi sektor-sektor unggulan (mis. pertambangan, perkebunan, energi) cenderung menghasilkan output bernilai tinggi yang terlokalisasi sehingga PDRB per kapita di beberapa kabupaten melonjak tanpa menyebar luas ke wilayah lain. Kedua, konsentrasi aktivitas ekonomi dan investasi di pusat perkotaan atau wilayah berdaya saing (mis. kota besar dan kabupaten

tertentu) menyebabkan distribusi pendapatan antarwilayah menjadi timpang. Ketiga, perbedaan kapasitas daerah dalam menyerap investasi dan distribusi belanja publik (fiskal daerah) juga berperan, studi seperti yang pernah dikaji Ririn Nopiah et al (2024) menunjukkan bahwa alokasi belanja publik yang kurang merata dapat menghambat penurunan disparitas. Faktor-faktor ini sejalan dengan pengamatan bahwa beberapa kabupaten menunjukkan PDRB per kapita berada jauh di atas rata-rata provinsi.

Hasil penelitian ini konsisten sebagian dengan laporan BPS provinsi lain (mis. Jawa Tengah) dan studi lintas-provinsi yang menemukan heterogenitas tren IW antarwilayah; namun berbeda dari studi konvergensi pra-pandemi di Kalimantan Selatan (periode 2011–2019) yang melaporkan kecenderungan penyeimbangan. Perbedaan temporal ini mengindikasikan bahwa peristiwa pasca-COVID dan dinamika pemulihan sektor unggulan pada 2021–2022 mungkin mempengaruhi pola ketimpangan, sehingga hasil masa 2020–2024 tidak sepenuhnya sejalan dengan pola sebelum pandemi.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi kebijakan. Pertama, pemerintah provinsi perlu memperkuat kebijakan redistribusi melalui mekanisme transfer dan alokasi belanja daerah yang lebih pro-pemerataan, misalnya program dana alokasi khusus untuk infrastruktur di kabupaten tertinggal. Kedua, mendorong diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor padat karya di daerah-daerah tertinggal agar pertumbuhan lebih inklusif. Ketiga, kebijakan yang meningkatkan kapasitas penyerapan investasi (perizinan, SDM, konektivitas) di wilayah pinggiran dapat membantu menyebarluaskan manfaat pertumbuhan. Monitoring berkala Indeks Williamson dapat menjadi indikator evaluasi kebijakan pemerataan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan periode 2020–2024 menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif dengan adanya lonjakan signifikan pada tahun 2022, diikuti perlambatan pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, nilai Indeks Williamson selama periode penelitian memperlihatkan tren ketimpangan yang relatif meningkat dibandingkan tahun awal, meskipun pada 2024 terdapat sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil korelasi Pearson yang mengindikasikan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan menghasilkan nilai 0,20, yang mengindikasikan hubungan lemah dan searah, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berimplikasi pada pengurangan ketimpangan, melainkan cenderung berjalan tanpa keterkaitan yang signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan belum seluruhnya diikuti oleh pemerataan, sehingga pembangunan masih lebih terpusat pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada meningkatnya angka pertumbuhan, namun juga perlu memperhatikan distribusi hasil dari pembangunan secara merata melalui strategi pemerataan investasi, pengembangan potensi wilayah perdesaan, serta penguatan sektor-sektor ekonomi lokal agar ketimpangan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat lebih inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan sebuah dukungan beserta arahan selama proses menyusun artikel ini. Ungkapan terima kasih secara langsung juga ditujukan kepada Ibu Rosalina Kumalawati, M.Si., sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi Ekonomi di Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Besar harapan penulis agar artikel ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi berbagai kalangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. N., Suparta, I. W. & Taher, A. R. Y. (2025). Analysis of the Effect of Investment, Agglomeration, and Human Development Index on Regional Inequality in Eastern Indonesia 2019-2023. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 5(3), 588–596. <https://doi.org/10.47233/jebs.v5i3.2841>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Publikasi Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.
- BPS Jawa Tengah. (2023). *Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2019-2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Foster, G. C., Lane, D., Scott, D., Hebl, M., Guerra, R., Osherson, D. & Zimmer, H. (2018). *An Introduction to Psychological Statistics*.
- Galbraith, J. K. (1964). *Economic Development*. Harvard University Press.
- Ningsih, S. F. A. & Pahlevi, K. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(2), 399–410.
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779>
- Ririn Nopiah, Barika Barika & Septriani Septriani. (2024). Analysis of Inequality Structure and Its Correlation With Government Expenditure : A Study of Western Indonesia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(4), 450–468. <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i4.295>
- Sultan, Rahayu, H. C. & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A. & Ahmadi, D. (2023). *Analysis of Regional Development Disparity in Indonesia Period 2018–2021*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0_45
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: a Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4, Part 2), 1–84.
- Yasari, W. (2021). Convergence Analysis of Economic Growth in South Kalimantan Province 2011-2019. *Jejak*, 14(2), 304–315. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i2.30206>